



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD SYAUKANI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 235090

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.935.125.000
1. Tanah Seluas 316 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 430.125.000		
2. Tanah Seluas 4.840 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
3. Tanah Seluas 97 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
4. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	250.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	144.776.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.940.661.489
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.270.562.489
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.270.562.489



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TASRIEF ADRIANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **455752**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.165.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/27 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/27 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 765.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	211.500.000
1. MOBIL, SUZUKI ALL NEW ERTIGA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
2. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
3. MOTOR, YAMAHA BBS-R M/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	39.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.422.800.000
III. HUTANG	Rp.	498.263.008
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	924.536.992



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TUBAGUS IWAN RIDWAN
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 1019045

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.659.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 189.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000		
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	134.062.500
1. MOBIL, SUZUKI SWIFT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 92.625.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.625.000		
3. MOTOR, YAMAHA LEXI LX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 26.812.500		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	33.375.000
D. SURAT BERTAHAPAN	Rp.	1.775.600
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	84.874.660
F. HARTA LAINNYA	Rp.	109.000.000
Sub Total	Rp.	2.022.087.760



III. HUTANG

Rp. 213.860.236

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.808.227.524

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LUGUT AULIA RACHMAN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA UPTD PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAH RAGA
3. NHK : 852750

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 437.000.000

1. MOTOR, HONDA CB15A1RRF M/T SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, PIAGIO SPRIN 150 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX BENSIN Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 23.750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.230.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.412.980.000

III. HUTANG Rp. 1.016.354.516



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.396.625.484

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUGIONO
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 732030

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/80 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	18.000.000
1. MOTOR, YAMAHA BEJ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	33.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	800.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	301.800.000
III. HUTANG	Rp.	360.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-58.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.